



Buletin Parlementaria

Nomor 1199/III/V/2022 • Mei 2022

ستاد ورثه توسعه فناوري مالو



Indonesia Jajaki Industri Teknologi Nano Iran



3 Puan Maharani
Minta Pelayanan
kepada Pemudik
Tetap Optimal



4 Sufmi Dasco Harap
Penyakit Hepatitis Akut
Tidak Menjadi Pandemi



9 772614 339005

Indonesia Jajaki Industri Teknologi Nano Iran



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan delegasi DPR RI saat melihat langsung pengembangan produk teknologi nano oleh Komite Inovasi Teknologi Nano Iran. Foto: Azka/mvl

Indonesia tengah serius menjajaki kerja sama berbasis teknologi nano dengan Iran yang dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan. Diketahui Iran merupakan negara ke-4 di dunia penghasil teknologi nano, dan Iran siap bekerjasama untuk membangun industri teknologi itu di Indonesia.

Sebagai wujud keseriusan Indonesia dalam upaya mengembangkan teknologi nano, delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel langsung menemui Komite Inovasi Teknologi Nano Iran di Teheran pada Jumat (6/5), untuk melihat langsung perkembangan

produk teknologi nano yang sudah dikembangkan di negara itu, di antaranya produk ketahanan pangan, energi, dan industri.

Nano Technology merupakan ilmu atau teknologi yang mempelajari objek yang ukurannya sangat kecil (sepermiliar meter) yang kemudian dimanipulasi untuk menghasilkan benda-benda baru dengan karakter khusus yang diinginkan. Pada dasarnya, teknologi nano merupakan lompatan teknologi untuk merekayasa benda-benda baru dari benda-benda yang sudah ada.

“Saya sangat berkesan dengan penjelasan yang dipresentasikan. Semua ini merupakan isu-isu yang

banyak di negara. Iran Nanotechnology Innovation Council (INIC) menjawab semua persoalan yang ada di seluruh negara, seperti tentang lingkungan hidup dan juga meningkatkan hasil bumi. Saya juga berharap Indonesia dan Iran bisa menjalin kerja sama untuk membangun kesejahteraan umat di muka bumi ini,” ungkap Gobel.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng

Suparwoto melihat bahwa dengan hadirnya teknologi nano ini dapat mengurangi persoalan seperti lingkungan hidup dan juga bisa meningkatkan sumber daya alam yang lebih baik. Indonesia pun siap untuk membentuk komite bersama untuk merealisasikan kerja sama pengembangan teknologi nano.

“Dalam bidang energi, teknologi nano dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi minyak bumi melalui teknologi

Enhanced Oil Recovery (EOR) hingga 20 persen. Semoga dapat menjadi solusi di tengah terus menurunnya *lifting* minyak nasional,” kata Sugeng usai pertemuan dengan jajaran INIC di Teheran.

Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel (F-NasDem), dan diikuti oleh Ketua Komisi VI DPR RI Faisal Riza (F-PKB), Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto (F-NasDem), Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung (F-NasDem), Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah (F-NasDem), Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro (F-NasDem), serta Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan (F-Gerindra). ■ azk/sf



Puan Maharani Minta Pelayanan Kepada Pemudik Tetap Optimal



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Kresno/nvl

Arus balik pemudik Lebaran 2022 diprediksi masih akan terjadi hingga sepekan ke depan. Terpantau hingga Minggu (8/5) malam lalu, kendaraan yang kembali ke arah Jabodetabek di jalur tol masih cukup ramai. Terkait hal ini, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah dan *stakeholder* terkait agar tetap memberikan pelayanan terbaik bagi pemudik selama sisa arus balik ini. “Di berbagai daerah, baik di pelabuhan, bandara, dan stasiun masih tergolong cukup ramai. Pemudik yang kembali setelah masa libur lebaran selesai harus tetap mendapatkan pelayanan yang optimal. Kebutuhan masyarakat, termasuk *rest area* yang bersih dan layak harus menjadi perhatian,” kata Puan dalam keterangan persnya kepada *Parlementaria*, Senin (9/5).

Mantan Menko PMK ini pun meminta seluruh pihak memperhatikan skema atau skenario yang dibutuhkan untuk pemudik yang kembali usai puncak arus mudik. Puan mengatakan, sistem yang diambil harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat. “Sambil terus memastikan seluruh sarana protokol kesehatan dijalankan dengan baik sehingga kita dapat menekan kemungkinan peningkatan kasus Covid-19 usai mudik Lebaran,” jelasnya.

Diketahui, sistem *one way* di jalur tol sudah dihentikan setelah puncak arus balik semalam dan untuk mengurai kemacetan arus balik, Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri diperbolehkan *work from home* (WFH) seminggu usai libur Lebaran. Selain itu, para pengusaha juga dianjurkan melakukan hal yang sama sehingga pegawainya bisa kembali ke Jabodetabek secara bertahap.

“Namun untuk ASN atau PNS yang bekerja di bagian pelayanan publik, harus tetap bekerja di kantor seperti biasa agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Kepada masyarakat, saya mengucapkan selamat kembali memulai menjalankan aktivitas setelah libur Idulfitri selesai. Semoga silaturahmi dengan keluarga, termasuk yang ada di kampung halaman, dapat meningkatkan semangat di tengah tantangan pandemi Covid-19 yang masih ada,” pungkas Puan. ■ *we/sf*



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Wiryanan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindy, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom, Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irianidi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonarricha Firsta Dysle, Belggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Prima Danurtiro, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Alfdillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M, Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciaini, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Yudi Kresna

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Sufmi Dasco Harap Penyakit Hepatitis Akut Tidak Menjadi Pandemi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap penyakit hepatitis akut ‘misterius’ tidak menjadi pandemi seperti Covid-19. Karena itu, Dasco meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar serius mencari solusi untuk menangani penyakit tersebut, sehingga tidak menular, apalagi menjadi pandemi baru di Tanah Air.

“Mudah-mudahan soal hepatitis ini tidak seperti Covid yang kemudian menjalar menjadi pandemi, dan kita minta kepada kemenkes dalam hal ini untuk lebih serius menangani masalah ini,” kata Pimpinan DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan itu dalam keterangan tertulis yang diterima *Parlementaria*, Selasa (10/5).

Politisi Partai Gerindra ini menyebut pengalaman virus misterius yang kemudian

menyebarkan sudah pernah terjadi. Menurutnya, jika tidak dideteksi dan diantisipasi akan terjadi hal yang tak diinginkan. “Pengalaman hal seperti ini yang tidak dideteksi dini dan diantisipasi bisa membuat hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Dasco.

Oleh karena itu, dia meminta Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan segera berkoordinasi dengan Kemenkes dalam penanganan kasus hepatitis misterius tersebut. Langkah itu bakal dilakukan setelah masa reses Anggota Dewan yang akan berakhir pekan depan. “DPR akan segera masuk masa sidang, kita akan segera minta Komisi IX DPR koordinasi dengan mitranya itu, Kemenkes untuk mencari tahu sebab-sebab hal yang menimbulkan hepatitis ini,” kata Dasco.

Kemenkes saat ini telah berkoordinasi dengan WHO dan beberapa negara di Eropa untuk mencari tahu penyebab penyakit misterius tersebut. Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan melakukan tindakan pencegahan, salah satunya dengan menjaga kebersihan diri. Sebab, penyakit hepatitis akut yang tengah melanda dunia diduga telah masuk ke Indonesia setelah tiga anak dilaporkan meninggal dunia akibat terinfeksi penyakit misterius ini.

“Virus ini menularnya lewat asupan makanan yang lewat mulut. Jadi, kalau bisa rajin cuci tangan, kita pastikan yang masuk ke anak-anak kita. Ini banyak menyerang di bawah 16 tahun dan lebih banyak lagi di bawah 5 tahun,” kata Menkes. Dia

mengatakan secara umum, gejala awal penyakit hepatitis akut adalah mual, muntah, sakit perut, diare yang terkadang disertai demam ringan. Selanjutnya, gejala akan semakin berat seperti air kencing berwarna pekat seperti teh dan buang air besar berwarna putih pucat. ■ gal,rdn/sf



Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Dok/nvl



Terima Kunjungan Majelis Nasional, Komisi I Undang Korsel ke G20



Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI menerima kunjungan Ketua Komite Intelijen Majelis Nasional Republik Korea Kim Kyung-hyup. Foto: Jaka/nvl

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menerima kunjungan Ketua Komite Intelijen Majelis Nasional Republik Korea (Chairman of Intelligence Committee of National Assembly), Kim Kyung-hyup di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (10/5). Pertemuan tersebut membahas banyak hal antara kedua negara, mulai dari sistem parlemen di masing-masing negara, kerja sama pertahanan hingga undangan secara langsung untuk menghadiri untuk rangkaian G20 di Indonesia.

“Kita punya persahabatan yang sangat panjang, kita punya kerja sama



**KITA PUNYA
PERSAHABATAN YANG
SANGAT PANJANG,
KITA PUNYA KERJA
SAMA DI BIDANG
PERTAHANAN DAN LAIN-
LAIN, INTELIJEN JUGA.
SEHINGGA, KEHADIRAN
KOREA (DI G20) NANTI
AKAN MENJADI AMAT
PENTING**

di bidang pertahanan dan lain-lain, intelijen juga. Sehingga, kehadiran Korea (di G20) nanti akan menjadi amat penting,” undang Meutya kepada Kim Kyung-hyup secara langsung.

Beberapa kerja sama yang sedang dijalin Indonesia dengan Korea Selatan di bidang pertahanan antara lain pembuatan kapal selam melalui Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korea Selatan dan PT PAL Indonesia serta kerja sama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX yang dilaksanakan kedua negara sejak tahun 2014 lalu.

“Untuk kerja sama pertahanan (Indonesia-Korsel) kami terus dukung. Untuk kapal selam, saya sendiri hadir Surabaya di PT PAL, karena kerja samanya dengan PT PAL. Lalu untuk KFX/IFX Komisi I juga mengirimkan perwakilan ke Korea ketika *rollout project*. Ada yang salah satu anggota kami yang juga hadir di sana bersama Bapak Menteri Pertahanan (Prabowo Subianto),” terang Meutya.

Hadir pula Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno, Sukamta dan Junico BP Siahaan. Pada kesempatan yang sama, Junico BP Siahaan juga meminta dukungan dan sikap politis dari Korea Selatan terkait masalah separatisme di Papua. Nico berharap Parlemen Korea Selatan bisa membantu menjaga kedaulatan Indonesia dengan mengambil sikap bahwa Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia.

Pada pertemuan tersebut Kim Kyung-hyup didampingi oleh Kim Byung-kee dan Ha Tae-keung yang juga merupakan Anggota Komite intelijen Majelis Nasional serta Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae-sung. “Kami sangat senang dan mengucapkan terima kasih telah menerima kami dengan baik. Kami berharap ke depannya akan banyak kerja sama dan juga komunikasi yang lancar antara dua parlemen, khususnya di Komisi I dan komite intelijen kami. Ya jadi bisa mempunyai hubungan yang lebih baik,” ujar Kim Kyung-hyup. ■ uc/sf

Nico Siahaan

Apresiasi Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia-Korsel

Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan mengapresiasi kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan terkait dengan industri pertahanan. Ia menyebutkan bahwa kerja sama kedua negara tersebut bukan sebatas pembelian senjata dan tidak main-main. Nico mengungkapkan hal tersebut usai mengikuti pertemuan Komisi I DPR RI dengan perwakilan Komite Intelijen Majelis Nasional Republik Korea Selatan.

“Hubungan Indonesia dengan (Korea Selatan) ini bukan sekadar pakta kerja sama, tapi sudah terbukti. Ini bukan main-main ya. Bukan sekadar beli senjata, satu pucuk senjata. Ini kapal selam dan sudah ada tiga. Ini pesawat dengan teknologi canggih, teknologi yang radarnya terbaik itu nanti akan dimiliki Indonesia dan Korea melalui KFX/IFX,” ujar Nico di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/5).

Kerja sama di bidang industri pertahanan antara Korea Selatan dan Indonesia telah terjalin sejak lama. Saat ini, setidaknya terdapat dua agenda besar dari kerja sama tersebut antara lain transfer teknologi dan pembangunan kapal selam serta pembuatan jet tempur berteknologi tinggi Korean Flight Experience/ Indonesia Flight Experience (KFX/IFX).

“Nanti hasilnya ada sekitar 168 pesawat, Indonesia akan kebagian 48 pesawat dan ini akan mulai mengudara tahun 2026. Harapannya seperti itu. Kalau kita bilang, ini adalah salah satu pesawat canggih ya, itu sudah masuk kategori 4,5 G. Menurut kami ini juga

akan menjadi kebanggaan Indonesia nantinya, makanya hubungan Indonesia dengan Korea Selatan dalam hal ini kerja sama dalam pesawat tempur sangat baik,” tambah politisi PDI-Perjuangan itu.

Dihimpun dari berbagai sumber, kerja sama industri pertahanan antara Indonesia dengan Korea Selatan tidak hanya terkait dengan pengadaan alutsista namun lebih menekankan pada pengembangan teknologi sehingga hadir pula keterlibatan langsung dari industri pada kerja sama tersebut.

Seperti pada proyek KFX/IFX yang tidak hanya dilakukan oleh industri

dirgantara Korea saja namun juga PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Sejak tahun 2021, PTDI telah mengirimkan insinyur terbaik mereka terkait dengan pembuatan pesawat tempur KFX/IFX. Sedangkan dalam pembangunan kapal selam melibatkan PT PAL Indonesia bekerjasama dengan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). ■ uc/sf



Anggota Komisi I DPR RI
Junico BP Siahaan.
Foto: Jaka/nvl

Komisi II Belum Tentukan Sikap Terkait Usul Kampanye 120 Hari Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan pihaknya belum menentukan sikap terkait usulan dari pemerintah tentang masa kampanye 120 hari pada Pemilu 2024. Ia menjelaskan sejauh ini Komisi II DPR RI masih melakukan *exercisement* yang akan dibahas dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pemerintah pasca masa reses mendatang.

“Namun, dari beberapa pandangan fraksi-fraksi yang berkembang di Komisi II DPR RI, kita inginkan adanya masa kampanye yang lebih singkat, efektif, dan

”

KOMISI II JUGA MENDORONG KEHADIRAN KAMPANYE DIGITAL YANG SEKARANG INI BANYAK DIGANDRUNGI OLEH PARA POLITISI YANG NORMANYA BELUM TERLEMBAGAKAN DENGAN BAIK DI UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU



Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Foto: Dok/nw

efisien,” ujar Rifqinizamy dalam keterangan tertulis yang diterima *Parlementaria*, Senin (25/4).

Penentuan masa kampanye ini menjadi krusial sebab berkorelasi dengan tahapan pengadaan dan distribusi logistik, mulai dari surat suara, alat peraga kampanye, dan sebagainya. Selama ini, tambahnya, masa kampanye dibuat lama agar proses pencetakan dan pendistribusian logistik itu bisa dilakukan dengan baik.

“Karena itu, mempersingkat masa kampanye di satu pihak juga harus melakukan perubahan regulasi yang efektif dan efisien terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa logistik di mana Perpres-nya harus diubah. Di pihak lain harus memberikan kepercayaan kepada masing-masing provinsi untuk melakukan pencetakan dan distribusi agar proses masa kampanye bisa

berkorelasi dengan itu,” tambah politisi PDI-Perjuangan ini.

Terakhir, Komisi II juga mendorong kehadiran kampanye digital yang sekarang ini banyak digandrungi oleh para politisi yang normanya belum terlembagakan dengan baik di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Diketahui, Ketua KPU Hasyim Asy’ari beberapa waktu lalu mengatakan calon presiden pada Pemilu 2024 bisa berkampanye keempat hingga lima kabupaten/kota jika durasi masa kampanye ditetapkan 120 hari.

Durasi masa kampanye selama 120 hari ini merupakan rancangan KPU. “Kalau misal 120 hari, 514 kabupaten dibagi 120 hari berapa? Empat ya. Itu artinya pada hari yang sama setidaknya capres mengunjungi empat sampai lima kabupaten dengan durasi setiap hari keliling nonstop,” kata Hasyim kepada media di Kantor KPU, Jakarta, Senin (18/4). ■ rdn/sf

Sahroni Apresiasi Kerja Sama Polri dengan *Stakeholders* Jaga Kondusivitas Arus Mudik dan Balik

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni beranggapan, kondisi mudik

Lebaran 2022 sangat membludak karena masyarakat tidak bisa pulang ke kampung halaman selama dua tahun karena pandemi Covid-19. Oleh karena itu ia mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan *stakeholders* lainnya dalam menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas.

Adapun berdasarkan pantauan Sahroni, pihak Kepolisian bekerja sama dengan aparat lainnya berhasil membuat mudik tahun ini kondusif dan tidak *chaos*. “Kepolisian telah sangat sigap dan siap dalam menangani kepadatan lalu lintas selama arus mudik maupun balik pada lebaran 2022,” ungkap Sahroni dalam keterangan persnya kepada **Parlementaria**, Jumat (6/5).

Sahroni pun menilai bahwa Polri telah berhasil melakukan kolaborasi dengan lembaga lain dalam menunjang strategi antisipasi arus mudik. Ia mengatakan Polri tidak hanya menurunkan lebih dari seratus ribu anggotanya, namun berkolaborasi dengan Kemenhub dan institusi terkait lainnya untuk mengurai kepadatan lalu lintas.

“Dengan adanya kolaborasi tersebut tentu juga membantu keberhasilan operasi ketupat selama 28 April sampai 9 Mei 2022. Saya harap masyarakat



KEPOLISIAN TELAH SANGAT SIGAP DAN SIAP DALAM MENANGANI KEPADATAN LALU LINTAS SELAMA ARUS MUDIK MAUPUN BALIK PADA LEBARAN 2022

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.
Foto: Jaka/rvi

bisa mengikuti segala arahan yang sudah disiapkan Kepolisian agar arus balik ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang disiapkan,” papar Sahroni.

Sebelumnya, Polri berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait menyiapkan 7 cara mencegah kepadatan arus lalu lintas saat arus balik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah/2022.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Presetyo menyebutkan tujuh cara mencegah kepadatan tersebut, di antaranya sistem satu arah, manajemen sistem di rest area (RAMS) hingga menyiapkan rute alternatif.

Dia mengatakan Polri bersama Kemenhub dan para pemangku kepentingan terkait untuk terus-menerus menyosialisasikan rute alternatif menuju Bandung dari Jakarta saat penerapan “*one way*”. ■ eko/aha





Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI usai meninjau Titik Nol Kawasan IKN. Foto: Husen/nvl

Reboisasi Hutan Harus Berjalan di Kawasan IKN

Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin menyerukan program reboisasi hutan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, harus berjalan dengan baik dan masif, mengingat ada pengambilalihan fungsi hutan untuk infrastruktur IKN. Walau ada yang dikalahkan akibat pembangunan IKN, ia menegaskan fungsi hutan harus diupayakan 100 persen berjalan.

“Saya melihat langsung hutan yang ada di perencanaan pembangunan IKN ini. Kondisi hutannya sangat bagus. Nanti akan ada reklamasi dan pengambilalihan hutan yang akan

dipergunakan untuk pembangunan IKN. Saya sebagai wakil rakyat mengharapkan kondisi riil seperti 100 persen, karena nanti akan dipergunakan untuk pembangunan IKN,” katanya usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI meninjau areal hutan di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (18/4).

Pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang bagaimana merelokasi hutan dengan reboisasinya yang masif agar fungsi hutan tetap lestari. Namun, di sisi lain, kata Rudi, sapaan akrab Syafrudin, pembangunan IKN harus tetap

berjalan baik. Pembangunan IKN dan program reboisasi harus seirama, serta berjalan bersamaan.

“Reboisasi mungkin saja tidak sampai 100 persen lagi. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertanggungjawabkannya. Setidaknya ada upaya untuk mengembalikan fungsi hutan. Kita harus mengembalikan fungsi hutan sebagai ekosistem untuk sirkulasi udara dan menjaga habitat. Mengembalikan hutan jadi asri kembali,” tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu lagi.

Legislator dapil NTB ini menambahkan, yang juga harus dipikirkan adalah bahwa di hutan ada banyak tumbuhan dan satwa endemik yang harus dilestarikan. Kementerian KLH memang sedang masif menyemai tumbuhan-tumbuhan endemik dan *native* (asli) khas hutan Kalimantan di lokasi yang tidak jauh dari pembangunan infrastruktur IKN. Dengan langkah ini, akan tercipta habitat baru sebagai pengganti hutan yang hilang dan satwa-satwa endemik pun bisa tetap hidup dan terjaga. ■ mh/sf

Syahrul Aidi Minta Pemerintah Benahi Manajemen Aturan Mudik Lebaran

Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyampaikan catatan terkait berjalannya arus mudik dan balik Lebaran 2022. Syahrul menyebut, masih banyak catatan dan pekerjaan rumah bagi pemerintah atas penyelenggaraan mudik lebaran tahun ini. Terkait apa saja yang harus dibenahi untuk arus mudik dan balik tahun mendatang, Syahrul meminta manajemen atau aturan-aturan mudik dibenahi dan tidak hanya melakukan kajian saja.

“Pertama harus dibenahi manajemennya, artinya pengaturannya. Kemenhub mengkaji harus benar-benar jangan hanya berdasar catatan saja. Tapi dengarkan pemudik langsung, survei. Jadi bukan hanya kajian atau berdasar laporan anak buah saja,” papar Syahrul dalam keterangannya, Selasa (10/5).

Politisi PKS ini pun memberikan catatan dan pekerjaan rumah bagi pemerintah atas penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini. “Masih banyak kecelakaan, yang memang bisa disebabkan faktor pemudik, tapi juga ada faktor fasilitas atau sarana prasarana yang tidak memadai atau belum aman,” ungkap Syahrul.

Dia pun menyayangkan masih adanya beberapa titik kemacetan parah di tol-tol Jawa. Padahal, ia mengklaim Komisi V DPR selaku mitra kerja Kementerian Perhubungan telah mengingatkan potensi ledakan pemudik tahun ini. “Ada kemacetan parah, seolah kita tidak pernah belajar dari dulu-dulu, padahal Kemenhub sudah mencatat semua dari rapat, bahwa mudik tahun



Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat.
Foto: Runi/nvl

ini pasti akan meledak, karena sudah dua tahun tidak mudik. Harusnya kan diantisipasi,” ujar Syahrul.

Syahrul beranggapan, pemerintah tidak belajar dari pengalaman kemacetan mudik sebelumnya dan gagal mengantisipasi ledakan 80 juta pemudik. “Harusnya kan bisa diantisipasi, sudah diwanti-wanti sejak awal tapi terulang lagi,” ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Riau II itu.

Sementara itu, terkait klaim pemerintah bahwa mudik tahun ini

berhasil, Syahrul menegaskan bahwa mudik tahun ini tidak sukses. Sebab, masih ditemukan banyak masalah.

“*Enggak sukses*. Kalau sukses kenapa ada banyak kemacetan fatal di tol. Sukses itu kalau minim masalah, memang tidak mungkin tidak ada masalah, tidak mungkin tidak macet, tapi kalau sampai 18 jam dari 2 jam lama perjalanan berarti kan tidak bisa dikatakan sukses. Juga gagalantisipasi lonjakan pemudik, padahal sudah diingatkan terus,” ujar Syahrul lebih lanjut. ■ eko/aha

Jasa Marga Harus Pastikan Kenyamanan dan Keamanan Pengguna Jalan Tol Hingga Arus Balik Lebaran Usai

Setelah dua tahun tertunda akibat pandemi Covid-19, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan mudik tahun ini sangat tinggi. Data PT Jasa Marga menyebutkan mudik Lebaran 2022 mencatatkan rekor tertinggi dibandingkan periode-periode Lebaran sebelumnya. Untuk itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berharap kepada Jasa Marga agar terus memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol hingga arus balik Lebaran usai.

“Pak Dirut Jasa Marga Subakti Syukur beserta jajaran telah bekerja keras memaksimalkan pelayanannya dalam mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas selama mudik Lebaran. Kami berharap pelayanan Jasa Marga terus ditingkatkan demi kenyamanan masyarakat pengguna layanan jalan tol di masa mendatang,” papar Andre dalam keterangan tertulisnya yang diterima **Parlementaria**, Senin (9/5).

Meskipun demikian, politisi Partai Gerindra ini mengapresiasi kinerja PT Jasa Marga sebagai BUMN terkait dengan penyelenggara jalan tol yang

telah memberikan layanan terbaik bagi para pemudik Lebaran Idulfitri tahun 2022. Menurutnya, arus mudik tahun menggunakan jalur darat, khususnya jalan tol Trans Jawa tahun ini relatif berjalan lancar berkat kesiapan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Jasa Marga.

“Kami mendengar Dirut Jasa Marga Pak Subakti Syukur rajin turun ke lapangan. Bahkan beliau sampai menginap di KM 70 GT Cikampek Utama (Cikatama) guna memastikan kelancaran arus

mudik Lebaran. Meski sempat terjadi kepadatan kendaraan di puncak arus mudik, tapi itu bisa segera terurai berkat koordinasi yang baik dalam merekayasa lalu lintas,” ujar Andre.

Ia pun menilai Jasa Marga bersama Kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya berhasil membuat situasi mudik tahun ini berjalan relatif lancar dan aman. Berbagai rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan terbukti efektif mengurangi kepadatan dan kemacetan di sejumlah ruas tol Trans Jawa.

Ada empat rekayasa lalu lintas yang disiapkan untuk arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Keempatnya adalah sistem satu arah, ganjil genap, arus berlawanan serta pembatasan kendaraan angkutan barang dan tiga sumbu. Diketahui, gelombang arus balik terus naik sejak hari kedua Idulfitri pada Selasa (3/5).

Berdasar data milik Jasa Marga, sejak 3 Mei sampai 5 Mei, sebanyak 563.000 kendaraan kembali ke Jabodetabek. “Tercatat ada sebanyak 1,7 juta kendaraan meninggalkan Jabodetabek mulai H-10 hingga H-1 Lebaran. Jumlah ini merupakan yang

tertinggi sepanjang sejarah mudik di Tanah Air,”

ungkap Andre. ■
eko/aha

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: Oji/nvl



Kunker Reses ke Batam, Komisi VII Evaluasi Aturan Larangan Ekspor Pasir Laut

Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VII DPR RI di Batam mendengarkan masukan dari pihak terkait terhadap aturan larangan ekspor pasir laut. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyebutkan, setelah mendengar beberapa masukan dari *stakeholder*, pihaknya akan menindaklanjuti kembali dengan mengadakan rapat bersama pemerintah pusat untuk mengentaskan problem tersebut.

Adapun beberapa poin utama pada kunker reses kali ini ialah, menurut Eddy, pentingnya koordinasi perizinan

penambangan pasir laut di Indonesia. Sekadar informasi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Januari 2022 lalu, Komisi VII DPR RI mengungkapkan adanya dua kementerian yang tengah memperebutkan tata kelola usaha pertambangan pasir.

Dua kementerian tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Baik melibatkan Kementerian ESMD maupun KKP agar diselaraskan lagi jika peraturan yang ada tumpang tindih,” ungkapnya saat memimpin tim Kunker kali ini yang mengadakan pertemuan

di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (11/5).

Selain itu, Eddy menuturkan, Tim Kunker Reses Komisi VII juga menerima masukan dari kepala-kepala daerah tingkat II di Provinsi Kepulauan Riau soal keterlibatan mereka sebagai pemerintah daerah dalam izin pertambangan itu. “Karena sebenarnya merekalah yang paling mengetahui kondisi daerah dan dampaknya terhadap lingkungan,” sebut politisi PAN tersebut.

Dalam pertemuan itu, Komisi VII juga tak menafikan bahwa pasir laut menyimpan potensi ekonomi yang besar dan berpeluang mendongkrak Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, kata Eddy, perlu dilakukannya evaluasi terhadap peraturan larangan ekspor yang saat ini tengah berlaku.

“Maka dari itu, tentu harus dilakukan kajian yang mendalam jangan sampai permasalahan ini kemudian mendatangkan pendapatan bagi negara tetapi justru berdampak buruk terhadap lingkungan,” urai Eddy. Selain mengkaji, Komisi VII usai melakukan Kunker Reses ini akan segera mengupayakan rapat gabungan dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya membahas persoalan ini. ■aha



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Batam, Kepri. Foto: Agung/nvl

Komisi VII Soroti Ketergantungan Bahan Baku Impor PT Kalbe



Foto bersama Tim Kunjer Komisi VII DPR RI dengan direksi PT Kalbe Morinaga Indonesia dan PT Kalbe Nutritionals. Foto: Icha/nvl

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono menyoroti sejumlah aspek dalam perindustrian di Tanah Air, khususnya bagi PT Kalbe Morinaga Indonesia dan PT Kalbe Nutritionals. Pertama, Sartono memaparkan bahwa ketergantungan industri dalam negeri terhadap impor bahan baku masih cukup tinggi. Sartono menyampaikan ke depannya perlu dilakukan rapat lintas komisi dan kementerian, untuk mendalami bagaimana respon dan solusi terhadap temuan-temuan tersebut karena dapat menghambat produksi dan kebutuhan di lapangan.

“Kami juga menemukan selain harga tinggi, tapi juga langka. Salah satunya nanti kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian karena terkait dengan salah satu bahan baku yang cukup banyak diimpor, yaitu susu,” jelas Sartono ketika memimpin

pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR dengan jajaran direksi PT Kalbe Morinaga Indonesia dan PT Kalbe Nutritionals di Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (11/5).

Selain permasalahan impor, Sartono juga menyoroti permasalahan daya beli masyarakat yang cenderung menurun saat ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sartono menyampaikan, hal tersebut merupakan salah satu imbas dari terjadinya inflasi. “Dalam dua tahun ini pemerintahan agar fokus terhadap sektor-sektor tertentu guna mengatasi menurunnya daya beli masyarakat, khususnya terhadap produk pangan,” papar Sartono.

Politisi Partai Demokrat itu juga mendukung PT Kalbe Morinaga Indonesia dan PT Kalbe Nutritionals dalam berbagai program dan produk yang dihasilkan untuk membantu

pemerintah mengatasi permasalahan stunting. Sartono meminta ada kerja sama lintas kementerian dan instansi untuk mengatasi masalah stunting di tanah air. “Agar dilakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang memiliki kasus stunting sehingga dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi dan mengatasi stunting,” papar Sartono.

Terakhir, Sartono juga meminta harus ada komposisi yang pas untuk kebutuhan pekerja atau pegawai di PT Kalbe Morinaga Indonesia dan PT Kalbe Nutritionals. “Komisi VII DPR mendukung program pelatihan-pelatihan bagi pegawai di PT Kalbe. Selain itu, masyarakat di sekitar pabrik ini juga harus mendapatkan manfaat dari keberadaan industri ini, dalam artian tidak terpinggirkan,” tutup legislator dapil Jawa Timur VII itu. ■ ica/sf

Komisi VIII Apresiasi Kesiapan Asrama Haji Balikpapan



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily saat memimpin Tim Kunker Komisi VIII DPR RI meninjau kesiapan Asrama Haji Balikpapan. Foto: Nadia/mvi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 mendatang, Komisi VIII DPR RI telah berusaha merumuskan kebijakan haji tanpa adanya setoran tambahan bagi masyarakat, mengingat setoran tambahan sudah ditutupi oleh nilai manfaat yang tersalurkan melalui *virtual account* di rekening para jemaah yang telah melunaskan setorannya.

“Kita tahu bahwa kami telah memutuskan biaya haji sebesar Rp39,8 juta. Para jemaah haji telah melunasinya sebesar Rp35 jutaan dan sisanya jemaah haji tidak perlu untuk memberikan setoran tambahan karena itu sudah ditutupi atau dipenuhi oleh nilai manfaat yang tersalurkan melalui *virtual account* di rekening para jemaah yang telah melakukan setoran lunas,” tuturnya di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Kota

Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (19/4).

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Komisi VIII DPR RI juga meninjau langsung kesiapan Asrama Haji Balikpapan dalam menyambut musim haji nantinya, mengingat asrama haji sempat dialihfungsikan menjadi tempat isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 beberapa waktu lalu.

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, Asrama Haji Balikpapan merupakan tempat transitnya jemaah haji dari empat Provinsi yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan daerah-daerah sekitar lainnya. Dirinya berharap kesiapan asrama haji ini nantinya dapat mengedepankan aspek kesehatan, dimana harus dilakukan tes PCR/antigen bagi jemaah haji sebelum mereka memasuki dan menempati asrama haji tersebut.

“Tentu kalau kita lihat, Asrama Haji Balikpapan sudah siap untuk menjadi tempat embarkasi untuk calon jemaah haji dari empat provinsi ya. Dari Kalimantan Timur dari Sulawesi Utara

dari daerah-daerah yang lain yang memang disediakan sebagai tempat transit. Dan tentu kita berharap bahwa kesiapan dari asrama haji ini dapat juga menjadi terlebih dahulu dilakukan PCR di asrama haji ini. Dengan fasilitas yang ada, saya kira sudah sangat layak ya untuk dijadikan sebagai tempat (transit jemaah haji),” kata Ace.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra mengapresiasi Asrama Haji Balikpapan yang menurutnya setara dengan Hotel Bintang 3 dan 4. Hanya saja menurutnya dalam perawatan asrama haji tersebut jika tidak melibatkan pihak ketiga, sehingga dikhawatirkan perawatannya menjadi kurang maksimal.

“(Asrama setara) bintang 4. Saya tanya ini bintang berapa ini, setara bintang 4 kalau saya umum masuk sini bayar Rp300 ribu. Cuma saya khawatir kalau (perawatannya) tidak dimainkan oleh pihak ketiga, akan tidak bagus perawatannya,” tandas politisi Partai Demokrat itu. ■ ndy/sf

Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Gencarkan Pemeriksaan Spesimen Hepatitis Misterius

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengencarkan penelitian dan pemeriksaan spesimen terkait kemunculan hepatitis akut misterius yang menyerang anak-anak. Menurutnya, pemeriksaan spesimen mesti gencar dilakukan supaya pemerintah tidak salah mengambil kebijakan dalam mengantisipasi penyakit tersebut.

“Hal ini penting dilakukan agar kita tidak salah langkah dalam mengantisipasi penyebaran hepatitis misterius yang sudah menyerang banyak negara ini,” kata Netty dalam siaran persnya yang diterima **Parlementaria**, Senin (9/5). Politisi PKS itu pun meminta pemerintah memberi informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai penyakit ini.

Netty mengatakan, penjelasan gamblang harus diberikan kepada masyarakat agar mereka tidak panik tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah juga diminta mengantisipasi beredarnya informasi hoaks mengenai penyakit hepatitis, misalnya kabar yang menyebut hubungan penyakit ini dengan vaksinasi Covid-19.

“Penting untuk menginformasikan peta penyebaran kasus, upaya yang dilakukan pemerintah dan kesiapan sistem kesehatan dalam melakukan antisipasi lonjakan kasus agar rakyat dapat berpartisipasi aktif melakukan pencegahan,” ujar Netty. Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan supaya hepatitis akut misterius

itu dapat tertangani bila kasusnya melonjak.

Sebagaimana diberitakan, pada Minggu (1/5) lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait adanya 228 kasus hepatitis yang terjadi di 20 negara. Hingga saat ini, WHO dan banyak negara masih melakukan investigasi terhadap penyebab dan perkembangan penyakit hepatitis misterius tersebut. ■

ann/aha

Anggota Komisi IX
DPR RI
Netty Prasetiyani.
Foto: Mentari/nvl



DPR Kecam Pernyataan Guru Besar Singgung SARA dalam Seleksi Beasiswa LPDP



Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal.
Foto: Ojji/nvl

DPR RI mengecam keras pernyataan guru besar sekaligus Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang menyinggung SARA dalam proses seleksi Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pernyataan guru besar di laman media sosial tersebut menyinggung penggunaan 'tudung kepala' dan atribut keagamaan lainnya terhadap 12 mahasiswi yang diwawancarainya dalam beasiswa studi lanjut.

"Pernyataan tersebut sangat diskriminatif terhadap mahasiswa berjilbab. Dan tentunya ini sangat disayangkan karena ini muncul dari seorang rektor dan profesor yang notabenebnya kaum berpendidikan," tegas Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal kepada awak media, Sabtu (30/4).

Illiza menilai seharusnya seorang rektor mencerminkan mencerminkan sikap dan tindakan yang santun, serta wawasan keilmuan yang luas bukan justru memperlihatkan tindakan *Xenophobia* (ketakutan terhadap sesuatu yang asing). Ia menambahkan guru besar tersebut seakan dengan sengaja melakukan pembedaan berdasarkan ras, dan ini juga menimbulkan kebencian pada golongan tertentu.

"Pernyataan itu sudah memojokkan agama tertentu,

karena diketahui bahwa agama yang memerintahkan untuk menutup kepala adalah agama Islam dan itu berani diungkapkan di negara yang mayoritas muslim," ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan, semua beasiswa dari dana LPDP bersumber dari uang rakyat. Proses seleksi berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ecky menilai pernyataan dari guru besar tersebut tergolong ujaran yang bersifat SARA dan pelecehan secara verbal terkait proses seleksi beasiswa. "Seluruh mahasiswa/i yang memenuhi syarat berhak mendapatkan beasiswa tersebut, termasuk yang memakai jilbab, kerudung atau tutup kepala," ujar Ecky kepada awak media, Sabtu (30/4).

”

PERNYATAAN TERSEBUT SANGAT DISKRIMINATIF TERHADAP MAHASISWA BERJILBAB. DAN TENTUNYA INI SANGAT DISAYANGKAN KARENA INI MUNCUL DARI SEORANG REKTOR

Ecky menegaskan pernyataan tersebut sangat menyakitkan umat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan dan persatuan Indonesia. "Tidak selayaknya dan tidak ada tempat bagi orang yang punya pemikiran rasisme ikut terlibat dalam seleksi dan penetapan pemberian beasiswa yang didanai LPDP" tegas Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini.

Ecky menjelaskan triliunan dana beasiswa yang dikelola LPDP harus digunakan dalam rangka mencerdaskan rakyat Indonesia. Maka harus ada afirmasi kepada mahasiswa/i daerah dan kurang mampu. Bukan semata-mata bagi mahasiswa/i yang pandai bahasa asing saja. "Saya minta Kemendikbud dan pihak LPDP harus melakukan evaluasi atasnya" tutupnya.

Diketahui, Organisasi LPDP bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dan dibentuk melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011. Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012 tanggal 30 Januari 2012, LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum. Sehingga, LPDP dan Kementerian Keuangan menjadi mitra kerja dari Komisi XI DPR RI. ■ rdn/sf

TPID Miliki Peran Penting Kendalikan Inflasi di Sulsel

Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said menilai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari informasi yang ia dapatkan, inflasi tahun 2021 di Sulsel lebih tinggi dibanding tahun 2020. Menurutnya TPID Sulsel harus bekerja keras lagi, mengingat adanya dampak dari tren kenaikan harga akhir-akhir ini. Terutama menyangkut kenaikan bahan bakar minyak hingga minyak goreng yang akan berpengaruh sangat luar biasa kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, ini harus dilakukan mitigasi secepat mungkin karena tren pembiayaan, tren belanja masyarakat menjelang Lebaran itu sangat tinggi. Apalagi (harga) BBM nanti bisa naik karena ini menyangkut harga secara umum, secara global kalau kita lihat ICP (Indonesia Crude Price) kita di dalam APBN kita itu 63 dollar AS per barrel.

Sekarang sudah lebih dari 115. Nah ini pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan fiskal kita sehingga berpengaruh kepada inflasi itu relatif pasti terjadi,” kata Muhidin usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja guna memantau pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi Sulsel, di Makassar, Sulsel, Senin (18/4).

Di samping itu, prediksi politisi Partai Golkar tersebut, permasalahan kenaikan harga gas 3 kilogram juga akan memberikan pengaruh. Termasuk adanya perang antara Rusia dan Ukraina, yang menurut perkiraan International Monetary Fund (IMF) situasi saat ini sangat luar biasa sekali, sehingga harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Muhidin menegaskan kembali, situasi gejolak ekonomi tahun 2022 ini harus mendapat perhatian khusus karena pengaruh global, di samping pandemi Covid-19 yang mulai menurun dan pergerakan ekonomi

semakin meningkat. Tetapi dengan adanya perang Rusia-Ukraina, semua segmen terpengaruh.

“Supply and demand itu sangat pengaruhnya luar biasa, karena negara-negara Eropa itu gas dan minyaknya banyak tergantung kepada Rusia. Sekarang Rusia perlu dilakukan embargo oleh negara-negara barat, bagaimana pun juga ini tidak bisa kita hindari, termasuk di Indonesia. Inilah yang secara harus hati-hati selalu kita ingatkan kepada Tim Pengendali Inflasi di daerah, sehingga betul-betul bisa memitigasi, sehingga daya beli masyarakat itu bisa terjamin. Harus dilakukan koordinasi karena ini kan untuk meningkatkan daya beli masyarakat apalagi menjelang Lebaran ini,” tandas legislator dapi Sulawesi Tengah tersebut.

Di sisi lain, Muhidin mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Sulsel yang lebih tinggi sedikit dibanding rata-rata nasional karena di Sulsel ini kontribusi pertumbuhannya bertumpu pada perdagangan, pertanian hingga perikanan. “Bidang pertaniannya sangat luar biasa, kalau kita lihat kredit usaha rakyatnya itu hampir 40 persen lebih bertumpu pada sektor pertanian. Ini sangat bagus sekali dan punya NPL (Non-Performing Loan) relatif sangat kecil hanya 1 persen lebih. Ini harus dicontoh, sehingga target yang diinginkan pemerintah untuk penyaluran kredit KUR itu tercapai dengan baik,” tandas Wakil Ketua Banggar DPR RI itu. ■ sf



Foto bersama Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan mitra kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Foto: Sofyan/nvl

Said Abdullah Dukung Sikap Indonesia Undang Presiden Ukraina-Rusia pada KTT G20

Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah mendukung sikap Pemerintah Indonesia yang akan mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada KTT G20 Bali pada November 2022 mendatang. Sebab, menurut Said, hal itu bagian dari upaya untuk menurunkan tensi ketegangan Rusia dan Ukraina. Meskipun demikian, Said mengakui, jika mengacu ketentuan G20, Volodymyr Zelenskyy tidak memiliki hak bicara karena Ukraina bukan anggota G20. Ruang bagi Zelenskyy di KTT G20 hanya sebagai pemantau.

“Namun Indonesia sebagai tuan rumah KTT, sekaligus Presidensi G20 dapat membuat *side event meeting* yang mempertemukan Zelenskyy dan Putin. Apalagi tiga tema sentral G20, yakni Global Health Architecture, Sustainable Energy Transition, dan Digital Transformation sama sekali tidak terkait dengan Perang di Ukraina,” kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Minggu (8/5).

Meskipun bukan pada tempat yang proporsional melibatkan konflik Rusia dan Ukraina di G20, kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini, Indonesia memilih berfikir dewasa dan menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat atas upaya perdamaian dunia.

“Kita berharap Amerika Serikat dan aliansinya bisa melihat kesungguhan Indonesia dalam mengupayakan perdamaian kedua belah pihak. Kita berharap negara-negara Eropa yang tergabung dalam G20 seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia ikut

memberikan dukungan atas peran yang diambil oleh Indonesia dalam mengupayakan perundingan damai antara Ukraina dan Rusia,” kata Said.

Said menambahkan, Eropa perlu mencatat bahwa eskalasi di Ukraina akan berdampak langsung ke seluruh kawasan. Apalagi jika kecamuk perang terus berkepanjangan, jutaan arus pengungsi akan menjadi beban negara-negara penampung. Eskalasi yang kian menegang di Ukraina juga akan menekan berbagai komoditas utama, seperti gas, minyak bumi, dan minyak biji bunga matahari serta gandum. Akibatnya, daratan Eropa juga yang akan merasakan risikonya. “Apalagi jika sampai pecah perang nuklir, tidak menutup kemungkinan sebagian besar daratan Eropa yang penuh kemakmuran dalam sekejap rata tanah,” imbuh Said.

Indonesia sejauh ini menghendaki penghentian peperangan di Ukraina dan mendorong para pihak menempuh jalan perundingan sebagai jalur penyelesaian konflik dan tidak memihak. Hal itu sebagaimana konsekuensi dari perintah konstitusi sebagaimana tercantum dalam pembukaan. Said menambahkan, meskipun secara geopolitik, Indonesia dikepung oleh pakta pertahanan FPDA (Five Power Defence Arrangements), sebuah pakta pertahanan yang merupakan Persemakmuran Inggris (Inggris, Singapura, Malaysia, Australia dan Selandia Baru), posisi ini tidak serta merta membuat Indonesia langsung merapat ke Poros Tiongkok.

Alih-alih merapat ke Tiongkok, menurut Said, Indonesia malah

beberapa kali *clash* dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara atas klaim Tiongkok melalui *nine dash line* yang tidak berdasar pada hukum laut internasional. Indonesia, tegas Said, teguh dengan politik luar negeri yang bebas, yang berarti bukan dari berbagai aliansi atau pakta pertahanan. Walau begitu Indonesia memandang penting untuk aktif dalam menempuh perdamaian dunia melalui berbagai saluran diplomasi internasional yang sah.

“Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ini cukup menguntungkan. Sebab Indonesia memiliki legitimasi politik dan moral dari para pihak yang bersengketa. Terlebih dengan posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 menjadi tambahan bekal yang memadai untuk menguatkan perannya,” tutup politisi PDI-Perjuangan ini. ■ rdn/sf

Anggota Komisi XI
DPR RI Said Abdullah.
Foto: Runi/nvl



BKSAP Dorong Peningkatan Kerja Sama Indonesia dengan Swedia

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Swedia untuk Indonesia Marina Berg, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4). Pertemuan ini dalam rangka mendorong dan meningkatkan kerja sama yang selama ini terjalin antar kedua negara, khususnya dalam bidang parlemen, *sustainable energy* dan *sustainable transport system*.

“Pertemuan dengan Duta Besar Swedia, karena kebetulan BKSAP akan melakukan diplomasi ke Swedia (23-28 April 2022) terkait berbagai kerja sama di bidang parlemen, dan

kemarin juga Vice President IPU dari Swedia. Kemudian *sustainable energy*, *sustainable transport system* itu juga kan banyak dari Swedia. Jadi rencananya kita akan bertemu dengan Ketua Parlemen Swedia, IPU dari Swedia, dan International IDEA,” jelas Fadli.

Selain itu, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut juga mengatakan, BKSAP akan fokus pada pembahasan mengenai energi terbarukan dan akan bertemu dengan para ahli dan produsen transportasi ramah lingkungan di Swedia, terkait rencana sinergi yang bisa terjalin antara Indonesia dengan Swedia.

“Terkait energi terbarukan, kita juga akan bertemu dengan institusinya

disana, *tourisme* juga di sana, kemudian Scania, karena kita lihat mereka (Scania, **red**) *sustainable* dalam bahan bakarnya. Tentu harapannya kita akan menjalin kerja sama sesuai tupoksi kita di BKSAP, menjembatani *parliamentary diplomacy*,” jelas Fadli.

Dalam pertemuan ini juga, BKSAP menanyakan kepada Duta Marina terkait insiden pembakaran Al Quran oleh salah satu anggota parlemen di Swedia, Rasmsus Paludan. Yang mana menurut Marina itu merupakan tindakan individual dari seorang politisi radikal kanan dan itu tidak mencerminkan masyarakat Swedia pada umumnya.

“Mereka tidak membenarkan satu tindakan yang menyebabkan Islamophobia tetapi mereka juga tidak bisa melarang *freedom of expression and freedom of speech*. Dan sudah dilaporkan ke kepolisian, sudah diproses hukum. Artinya mereka juga sangat *open minded*, sangat terbuka mereka juga mempromosikan demokrasi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Saya kira kita mempunyai banyak persamaan dengan Swedia. Makanya tadi kita berikan juga Al Quran kepada Duta Besar Swedia pada kesempatan ini,” tutup Fadli. ■ **we/sf**



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon bertukar cenderamata dengan Duta Besar Swedia untuk Indonesia Marina Berg. Foto: Andri/nvl

Sekjen DPR Ajak Civitas Akademika USK Teladani Sejarah Aceh Hadapi Tantangan Masa Depan



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.
Foto: Devi/nvl

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memberikan kuliah umum dengan judul “Peluang dan Tantangan Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Rakyat Aceh di Era Tatanan Dunia Baru” di hadapan Rektor, Civitas Akademika, dan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Dalam kesempatan itu, Indra mengajak civitas akademika USK untuk bisa mawas diri sekaligus introspeksi.

Yakni sejauh mana kemampuan mempelajari, menggali, dan meneladani sejarah dan peradaban masyarakat Aceh di masa lalu, membahas dan menganalisa kemajuan dan tantangan yang dihadapi di masa kini. “Dengan basis masa lalu dan masa kini tersebut kita dapat melakukan proyeksi kemajuan Aceh di masa yang akan datang,” tutur Indra saat memberikan kuliah umum di Aceh, Rabu (11/5).

Ia menyampaikan, berdasarkan sejarah, Aceh sering disebut sebagai tempat persinggahan para pedagang dari penjuru dunia, dan semakin menonjol perdagangannya saat era Islam masuk ke kawasan itu. Sementara pada abad modern ini, tambah Indra, pertumbuhan perekonomian Aceh pada tahun 2022 diperkirakan meningkat dibanding tahun 2021.

Kondisi tersebut utamanya diperkirakan oleh perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi. Pada sisi

lain, keberhasilan program vaksinasi massal dan vaksin *booster* tahap ketiga juga diperkirakan akan mendongkrak aktivitas dan mobilitas masyarakat Aceh dalam menggerakkan roda perekonomian.

“Harus diakui, ketidakpastian ekonomi karena pandemi diperkirakan masih berlanjut dan masih menjadi faktor penghambat pemulihan ekonomi. Hal tersebut juga diperkirakan menjadi salah satu hambatan perbaikan angka kemiskinan di Aceh,” paparnya. Indra menegaskan, menjadi tugas bersama untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang tenteram, senang, sehat sentosa serta sejahtera.

Ia pun berpendapat, perlu ditingkatkan kebijakan lain yang berbasis pada mata pencaharian besar mayoritas masyarakat Aceh. Dalam wujud yang nyata, menurutnya sektor pertanian Aceh “*jumping*” ke sektor perdagangan tanpa melalui tahap pengolahan non-migas.

“Untuk itu DPR RI berupaya menyusun revisi UU tentang Pemerintahan Aceh sebagai sebuah solusi atas tantangan yang saat ini dihadapi. Saya selaku Sekretaris Jenderal DPR RI menilai perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh bukan hanya melalui kerangka regulasi saja. Ada peluang lainnya yang dapat dimaksimalkan oleh rakyat Aceh dan tentunya

membutuhkan peran serta institusi pendidikan pada umumnya dan perguruan tinggi pada khususnya, yaitu mewujudkan peningkatan kualitas SDM,” tandasnya.

Indra menyampaikan, harus diakui bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah di mana saat ini Indonesia sedang menghadapi tatanan dunia baru yang beragam di depan mata. Setiap negara perlu berbenah dengan memperkuat digitalisasi di berbagai bidang, baik sektor ekonomi, pendidikan, maupun teknologi. Tentunya kemajuan zaman di setiap era kehidupan memiliki dampak positif dan negatif.

“Sebagai orang yang lahir dan berasal dari tanah Aceh, saya sangat mengharapkan Aceh dapat mengejar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dapat menghadapi era tatanan dunia baru ini dengan baik. Namun demikian, perubahan dan kecepatan kita beradaptasi jangan sampai melunturkan sifat kekhasan yang dimiliki oleh Aceh yakni soal keteguhan pada ajaran-ajaran Agama Islam terutama kepatuhannya menjalankan segala syariat Islam,” pungkas Indra. ■ dep/aha

BURT Ingatkan Komitmen Layanan Prima Hingga Level *Frontliner* di *RS Provider*



Tim Kunker BURT DPR RI meninjau fasilitas dan sarana prasarana RS Mayapada BMC, Bogor, Jawa Barat. Foto: Prima/rvl

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurnia mengatakan komitmen untuk memberikan layanan maksimal kepada peserta layanan Jamkestama VVIP di Rumah Sakit Mayapada BMC Kota Bogor harus ditanamkan dari manajemen tertinggi, hingga paling bawah, khususnya *frontliner*. Menurutnya penguatan layanan di *frontliner* harus diperkuat mengingat bagian tersebut merupakan garda terdepan layanan yang langsung bersinggungan dengan pasien.

“Dirut RS Mayapada sudah menjelaskan bahwa mereka orientasi adalah kepuasan *customer*. Tentu tadi saya ingatkan bahwa apa yang menjadi komitmen jajaran direksi dan manajemen untuk juga turun ke bawah, mengingat yang bertemu pertama dengan pasien itu bukan mereka, tetapi *frontliner*,” kata Indah usai mengikuti pertemuan tim kunjungan kerja BURT dengan jajaran RS Mayapada BMC, di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/5).

Terkait dengan pelayanan kepada pasien, lanjut Indah, RS *provider* juga harus memberikan layanan yang maksimal kepada pasien selain dari

peserta asuransi Jamkestama. Menurut Indah, para pasien yang menggunakan asuransi lain juga berkewajiban membayar premi, sehingga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan.

“Kami berharap pelayanan yang terbaik hingga ke bawah terutama juga meskipun kami datang mewakili anggota DPR tapi kami juga ingatkan untuk layanan yang lain yang menggunakan asuransi seperti BPJS agar *mindset* mereka terhadap pasien BPJS itu tidak dianggap gratis tetapi kita semua membayar premi,” tutup politisi PDI-Perjuangan tersebut. ■ pdt/aha

Gelar FGD Perubahan UU Pemerintahan Aceh, BK DPR Serap Masukan Akademisi dan Tokoh Masyarakat

Badan Keahlian (BK) DPR RI bekerjasama dengan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Arah Kebijakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Samsul mengatakan bahwa secara prosedural formal pembentukan UU, kegiatan FGD tersebut merupakan bagian dari pemberian

ruang untuk menyerap masukan dan aspirasi dari para sivitas akademika dan tokoh masyarakat terhadap penyusunan Naskah Akademik dan RUU atas UU Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

“Secara substantif Naskah Akademik yang ada memang masih perlu untuk ditambahkan agar lebih komprehensif dan lengkap. Untuk itu, dalam FGD ini kita mengundang sembilan orang narasumber, yakni lima orang narasumber dari perguruan tinggi dan empat orang dari kelompok-kelompok masyarakat,” ungkap Sensi, sapaan akrabnya, di Kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Selasa (10/5). Ia berharap semua masukan

Kepala Badan Keahlian
Setjen DPR RI Inosentius
Samsul. Foto: Devi/nvl

”

KEGIATAN FGD TERSEBUT MERUPAKAN BAGIAN DARI PEMBERIAN RUANG UNTUK MENYERAP MASUKAN DAN ASPIRASI DARI PARA CIVITAS AKADEMIKA DAN TOKOH MASYARAKAT

dan aspirasi yang telah disampaikan para narasumber dan peserta diskusi dalam acara tersebut nantinya bisa melengkapi dan memperbaiki apa yang sedang dirumuskan oleh Badan Keahlian DPR RI saat ini. Secara urgensi, tambahnya, UU Pemerintahan Aceh yang ada ini dirasa belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.

“Argumentasi itu secara yuridis maupun sosiologis sudah sangat saklek. Dan undang-undang ini usianya juga sudah cukup lama yaitu 16 tahun dan layak untuk dilakukan revisi, apalagi hingga saat ini Peraturan Pemerintah (PP)-nya juga belum ada,” ujarnya.

Sensi berharap kualitas UU yang dibuat ini nantinya bisa berkualitas baik. “Dengan demikian tidak mudah dibongkar-bongkar karena tidak ada celah untuk dikritisi baik secara teknokratik maupun secara politik,” pungkask Sensi. ■ dep/aha





Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat memimpin kunjungan kerja BURT DPR RI ke RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra Surabaya. Foto: Munchen/nvl

BURT DPR Apresiasi Layanan dan Fasilitas RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra Surabaya

Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau layanan dan fasilitas Rumah Sakit Mitra Keluarga Pondok Tjandra, Surabaya. Sebagai RS yang berdiri dalam satu grup Mitra Keluarga, RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra turut menjadi RS *provider* dari PT Jasindo yang menjalankan program Jamkestama kepada Anggota DPR RI. Usai melaksanakan pemantauan terhadap berbagai fasilitas, Ketua

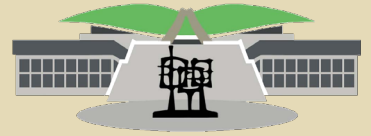
BURT DPR RI Agung Budi Santoso menilai RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra memiliki fasilitas dan pelayanan kesehatan yang sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Walaupun ini rumah sakit baru, tapi kami melihat fasilitas dan pelayanannya sudah sesuai dengan SOP. Di sini juga memiliki unggulan untuk penyakit jantung dan *trauma center*. Sehingga kami harap ini bisa memberi fasilitas tambahan bagi rumah

sakit untuk para Anggota DPR beserta keluarganya. Saya kira sudah cukup representatif untuk melayani anggota DPR dan keluarganya,” tutur Agung saat memimpin Kunjungan Kerja BURT DPR RI ke RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra di Surabaya, Jawa Timur, Senin (9/5).

Di sisi lain Agung mengapresiasi salah satu program dari grup Rumah Sakit Mitra Keluarga, yaitu *one medical record*. Program ini dinilai efektif dan efisien dalam menangani pasien, termasuk kepada peserta Jamkestama. Politisi Partai Demokrat ini berharap program ini dapat dikembangkan tidak hanya di antara RS yang tergabung dalam grup Mitra Keluarga, namun juga oleh seluruh RS *provider* Jasindo.

“Sehingga bapak dan ibu Anggota Dewan dan keluarga yang berobat tidak perlu lagi membawa kertas, berkas, foto mengenai kesehatannya. Cukup dengan konektivitas antara rumah sakit *provider* ini. Sehingga harapan saya, lebih cepat tertangani. Jadi, *golden time* dari penanganan ini betul-betul dapat tercapai. Ini perlu menjadi pembahasan khusus di antara Jasindo dan rumah sakit *provider*,” tandas legislator dari Jawa Barat I tersebut. ■ *mcn/sf*



Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti saat memimpin pertemuan Tim Kunker BURT DPR RI dengan direksi Kasih Ibu General Hospital Kedonganan-Kuta Bali dan Jasindo Cabang Denpasar di Kota Denpasar, Bali, Kamis (12/5). Foto: Puntho/nvl



Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat membuka FGD yang mengangkat tema 'Arah Kebijakan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh' di Banda Aceh, Selasa (10/5). Foto: Devi/nvl



Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Setyanta Nugraha saat memimpin kegiatan Sosialisasi Manajemen Pengawasan dan Launching SIMAWAS serta penerapannya, di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (12/5). Foto: Ojji/nvl

